

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy begins with the handover of a number of authorities (affairs) from the central government to local governments. One of the sources of Local Original Income (PAD) that is transferred from the central government to the local government is the Land and Rural Land and Urban Tax (PBB-P2). The management of PBB-P2 in the region uses information and tax object management system (SISMIOP) which has covered all aspects of PBB-P2 administrative management. Implementation of SISMIOP in BKAD encountered several obstacles related to the use and development of the system. The SISMIOP menu display is quite complex and some menus can not run. In terms of SISMIOP technology is far behind and to be developed on the same platform requires a large cost. SISMIOP is perceived not to provide benefits as expected by the user.

The research type is descriptive with quantitative approach. Technique of collecting data by using questioner as instrument. Population in this research is all user of SISMIOP which amount 60 people. Data analysis using Partial Least Square (PLS) with smartPLS software 3. Research using HOT Fit method modified by adding two new variables that is Facilitating Condition and User Training.

The result of hypothesis testing shows that the utilization rate of SISMIOP in BKAD Bantul Regency is influenced by the system usage factor, organizational structure, information quality and service quality. Overall SISMIOP implementation can be said not yet maximal. The average response of the net benefit variable of 3.97 indicates that SISMIOP has not delivered the benefits expected by the users: improving performance, helping the work become more efficient, helping to increase PAD targets and helping better PBB-P2 management.

Keywords: Regional Autonomy, SISMIOP, PBB-P2, PLS, HOT Fit

INTISARI

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 di daerah menggunakan sistem informasi dan manajemen objek pajak (SISMIOP) yang telah mencakup seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB-P2. Implementasi SISMIOP di BKAD menemui beberapa kendala yaitu terkait penggunaan dan pengembangan sistem. Tampilan menu SISMIOP cukup rumit dan beberapa menu tidak dapat dijalankan. Dari segi teknologi SISMIOP sudah tertinggal jauh dan untuk dikembangkan pada platform yang sama membutuhkan biaya yang besar. SISMIOP dirasakan belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan oleh user.

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument. Populasi dalam penelitian ini adalah semua *user* SISMIOP yang berjumlah 60 orang. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan software smartPLS 3. Penelitian menggunakan metode HOT Fit yang dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel baru yaitu *Facilitating Condition* dan *User Training*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan SISMIOP di BKAD Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh faktor penggunaan sistem, struktur organisasi, kualitas informasi dan kualitas layanan. Secara keseluruhan implementasi SISMIOP dapat dikatakan belum maksimal. Rata-rata jawaban responden pada variabel *net benefit* sebesar 3,97 menunjukkan bahwa SISMIOP belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan oleh pengguna yaitu meningkatkan kinerja, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, membantu meningkatkan target PAD dan membantu pengelolaan PBB-P2 semakin baik.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, SISMIOP, PBB-P2, PLS, HOT Fit